

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I ARAH HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.....	1
1.1 Arah Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah: Latar Belakang dan Konteks Kajian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.4 Signifikansi Penelitian .....	13
BAB II KAJIAN TEORI RELASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.....	15
2.1 Perkembangan Studi Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah .....	15
2.2 Teori dalam Kajian Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	22
2.3 Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perspektif Teori Prinsipal- Agen.....	28
2.4 Pilar Regulatorif Kelembagaan dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah ..30	
2.5 Konseptualisasi Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perspektif Pilar Regulatorif.....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	57
3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian .....	57
3.2 Data dan Sumber Data .....	59
3.3 Analisis Data.....	65
3.4 Sistematika Disertasi.....	68

<b>BAB IV ARAH HUBUNGAN PEMRINTAH PUSAT DANA DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PRINSIPAL-AGEN.....</b>	<b>71</b>
4.1 Panduan Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	72
4.2 Deteksi Perencanaan dan Penganggaran Daerah .....	104
4.3 Koersi Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	115
4.4 Pelaporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	130
4.5 Kecenderungan Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Pilar Regulatif Perencanaan dan Penganggaran Daerah .....	140
4.6 Faktor-faktor yang Berkontribusi pada Kecenderungan Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah .....	156
4.7 Kesimpulan .....	186
<b>BAB V DAMPAK ARAH HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH .....</b>	<b>190</b>
5.1 Dampak Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Pemerintah Pusat.....	190
5.2 Dampak Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Pemerintah Daerah.....	201
5.3 Bentuk Ideal Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah .....	258
5.4 Kesimpulan .....	263
<b>BAB VI REFLEKSI KAJIAN REGULASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEBAGAI PENENTU ARAH HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH .....</b>	<b>265</b>
6.1 Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Berdasarkan Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah .....	265
6.2 Kebaruan, Kontribusi, dan Keterbatasan Penelitian sebagai Refleksi Kajian ...	273
6.3 Agenda Penelitian ke Depan .....	277
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>286</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Definisi Konseptual, Operasional, dan Indikator Pilar Regulatif .....	44
Tabel 2. 2	Definisi Konseptual, Operasional, dan Indikator Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Arah Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah .....	50
Tabel 2. 3	Definisi Konseptual, Operasional, dan Indikator Dampak Regulasi .....	55
Tabel 3. 1	Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data .....	61
Tabel 3. 2	Pelaksanaan Penelitian.....	68
Tabel 4. 1	Analisis Panduan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	86
Tabel 4. 2	Analisis Panduan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .....	93
Tabel 4. 3	Analisis Panduan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.....	94
Tabel 4. 4	Analisis Panduan Penganggaran Daerah .....	101
Tabel 4. 5	Analisis Deteksi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	108
Tabel 4. 6	Analisis Deteksi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .....	111
Tabel 4. 7	Analisis Deteksi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.....	111
Tabel 4. 8	Analisis Deteksi Penganggaran Daerah.....	114
Tabel 4. 9	Bentuk Koersi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	116
Tabel 4. 10	Analisis Koersi Perencanaan Pembangunan Daerah .....	120
Tabel 4. 11	Analisis Koersi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .....	123
Tabel 4. 12	Analisis Koersi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.....	123
Tabel 4. 13	Analisis Koersi Penganggaran Daerah .....	129
Tabel 4. 14	Analisis Pelaporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	134
Tabel 4. 15	Analisis Pelaporan Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .....	137
Tabel 4. 16	Analisis Pelaporan Evaluasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.....	137
Tabel 4. 17	Analisis Pelaporan Evaluasi Penganggaran Daerah .....	139
Tabel 4. 18	Kecenderungan Arah Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah.....	154
Tabel 4. 19	Latar Belakang Terbitnya Peraturan tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	164

Tabel 4. 20 Faktor-faktor yang Berkontribusi pada Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	182
Tabel 5. 1 Analisis Dampak Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Pemerintah Pusat .....	200
Tabel 5. 2 Keselarasan Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nawacita...	221
Tabel 5. 3 Keselarasan Tujuan RPJMD 2022-2027 DIY dengan Agenda RPJMN 2020-2024 .....	224
Tabel 5. 4 Keselarasan Sasaran RPJMD DIY 2022-2027 dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 .....	224
Tabel 5. 5 Keselarasan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Magelang dengan RPJMN 2020-2024 .....	227
Tabel 5. 6 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 dengan Misi RPJMN 2020-2024 .....	228
Tabel 5. 7 Nilai AKIP Provinsi Jawa Tengah .....	233
Tabel 5. 8 Nilai AKIP DIY .....	235
Tabel 5. 9 Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Magelang .....	236
Tabel 5. 11 Dampak Pengendalian Perencanaan dan Penganggaran Daerah terhadap Pemerintah Daerah.....	255

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Penelitian Topik Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Kata Kunci .....	4
Gambar 1. 2 Peta Penelitian tentang Regulasi.....	7
Gambar 2. 1 Perkembangan Studi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah .....	21
Gambar 2. 2 Pilar Regulatorif Kelembagaan.....	32
Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual.....	41
Gambar 3. 1 Alur Penelitian dan Analisis Data.....	67
Gambar 4. 1 Peta Peraturan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia	72
Gambar 4. 2 Pedoman Penyusunan RKPD 2019-2023 .....	83
Gambar 4. 3 Pemetaan RPJMD dan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .....	90
Gambar 4. 4 Panduan Penyusunan APBD 2018-2023 .....	97
Gambar 4. 5 Posisi SIPD dalam Implementasi Satu Data Indonesia .....	179
Gambar 5. 1 Bincang Lepas Ditjen Bina Keuda Kemendagri.....	199
Gambar 5. 2 Government Resources Management System Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .....	206
Gambar 5. 3 Aplikasi Pembentuk GRMS .....	207
Gambar 5. 4 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .....	209
Gambar 5. 5 Jogja Plan.....	211
Gambar 5. 6 Single Sign On Kabupaten Sleman.....	217
Gambar 5. 7 Sengguh .....	234
Gambar 5. 8 Model Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Kemitraan.....	262